LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterangan PertanggungjawabanBadan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memenuhiPeraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007. Dalam hal ini akan dijelaskan pencapaian Program dan kegiatan serta realisasi .

Dalam melaksanakan program ditunjukkan dengan Indikator kinerja dan semua telah dapat mencapai target yang diharapkan. Namun kami menyadari masih ada program di dalam pelaksanaannya yang belum dapat memuaskan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Kekurangberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan PertanggungjawabanBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 ini, kami mengucapkan terima kasih

Lubuksikaping, 9 Januari 2017
KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. M. SAYUTI POHAN, AP
NIP 19740721 199402 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling menonjol dalam pengelolaan Administrasi publik yang dituntut dalam era Reformasi ini. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap penyerahan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan ini dari rakyat ke Pemerintah.

Sebagai pembenahan manajemen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman telah menyusun Rencana Strategis dengan Visi:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT PASAMAN YANG TANGGUH, TANGGAP DAN TANGKAS DALAM MENGHADAPI BENCANA"

Untuk mencapai visi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman telah menetapkan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan selama Tahun 2016 – 2021.

Dalam Anggaran Belanja dan Rencana kegiatan Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan dengan beberapa program prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis yang hendak dicapai diaplikasikan dalam bentuk program prioritas Sebanyak 5 Program Yaitu **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan tiga kegiatan yaitu Administrasi Perkantoran, Pemeliharaan sarana & Prasarana Perkantoran, Rapat dan Koordinasi, **Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur** dengan dua kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan & Mesin dan Pembangunan Posko Damkar, **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dengan satu kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian aparatur, **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan satu kegiatan yaitu Penyusunan Laporan SKPD, **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam** dengan delapan kegiatan yaitu Pembinaan Kelompok Masyarakat Siaga Bencana., Pencegahan din iPenanganan Bencana Alam, Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran, Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana, Operasional Pemadam kebakaran, Operasional Penanggulangan Bencana, dan Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggara-penyelenggara Pemerintahan kepada Masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap jalannya pemerintahan.

Kemudian untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui kepegawaian yang berkualitas di Kabupaten Pasaman maka Badan Penanggulanan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2016 ttelah dialokasikan APBD Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 4.211.762.150,- yang terbagi dalam bentuk :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.515.472.356.-

Yang dimaksud dengan Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang melekat pada gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan bagi PNS.

b. Belanja Langsung / Kegiatan Rp. 2.116.154.800.-

Sedangkan untuk Belanja Langsung yaitu Belanja yang dipergunakan untuk pencapaian kinerja suatu organisasi dengan berdasarkan kepada tugas tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, maka pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman telah menuangkan ke dalam 5Program dan 13kegiatan.

Dari uraian tersebut di atas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban yang disajikan secara makro tersebut akan dapat lebih dipahami dengan menelusuri bab-bab berikutnya dalam buku LPPD ini, dengan harapan semua pihak dapat memahami kondisi yang telah kita perbuat dalam pelaksanaan APBD Tahun 2016 dan tentunya dalam pelaksanaan APBD Tahun 2016 ini akan dapat kita wujudkan tingkat kesempurnaanya sesuai dengan harapan kita.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

RINGKASAN EKSEKUTIF .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Dasar Hukum 1

B. Gambaran Umum Organisasi 2
C. Kepegawaian 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 9
A. Visi dan Misi 9
B. Strategik dan Arah kebijakan Daerah 11
C. Prioritas Daerah 13

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN DAERAH 14
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 14
B. Pengelolaan Belanja Daerah 14

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 15
A. Program dan Kegiatan 15
B. Realisasi Program dan Kegiatan 15
C. Permasalahan dan Solusi 17

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 23
A. Tugas Bantuan yang diterima 23
B. Tugas Bantuan yang diberikan 25

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM DAN PEMERINTAHAN 26
A. Kerja Sama antar Daerah 26
B. Kerja sama dengan Pihak ke 3 26
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal 37
D. Pencegahan dan penanggulangan Bencana 40

BAB VII PENUTUP 47
A. Kesimpulan 48
B. Saran 48

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam menjalankan visi dan misinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
4. PP RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. PP RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. PP RI Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Ka BNPB No 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ;
8. Peraturan Ka BNPB No 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Ka BNPB No 7 Tahun 2008 Tentang Tata Cara pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
10. Peraturan Ka BNPB No 8 Tahun 2008 Tentang Pemberian dan besaran santunan duka Cita;

B. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Struktur organisasi dan tata kerja

Dengan mengacu peraturan daerah kabupaten pasaman nomor 11 tahun 2011 maka susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman terdiri dari:

a. Kepala Pelaksana
b. Sekretaris
    1. sub bag umum
    2. sub bag keuangan
    3. sub bag evaluasi dan pelaporan
c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
    1. kasubid kedaruratan
    2. kasubid logistik
d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    1. kasubid pencegahan
    2. kasubid kesiapsiahaan
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
    1. kasubid rehabilitasi
    2. kasubid rekonstruksi
f. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 59 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman.

Tugas dan fungsi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 TUGAS

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penganggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rahabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.2 FUNGSI

Dalam penyelenggaraan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

C. Kepegawaiann

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Penanggulangan bencana daearah memiliki dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang dengan jumlah pegawai keseluruhan 80 orang, yang terdiri dari 36 orang PNS, 4 Honor daerah dan 40 orang pegawai kontrak.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman terdapat pegawai sebanyak 80 orang (delapan puluh) seperti berikut :

Tabel 1.1 Daftar Nominatif PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016

No	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. M. SAYUTI POHAN, AP	L	Kalak	IV b/ Pembina Tk I	S1 Pemerintahan	PIM IV PIM III
2	JENDRI YANI, SH	P	Sekretaris	Penata TK I/III.d	S1 Hukum	PIM IV
3	IKBAL, SH	L	Kabid. PK	IV.b /Pembina TK I	S1 Hukum	PIM IV PIM III
4	Ir. RIZALWIN, Msi	L	Kabid.RR	IV.a /Pembina	S2 Manajemen	PIM IV PIM III
5	IN ISRAIL, S.Sos		Kabid KL	IV.a /Pembina		PIM IV PIM III
6	ALI AMRAN.S,SH	L	Kasubag Evalop	Penata TK I/III.d	S1 Hukum	PIM IV
7	FERIZAL, ST	P	Kasi. Rehabilitasi	Penata TK I/III.d	S1 Teknik	PIM IV

No	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7
8	AJIDAR, ST	L	Kasi. Rekontruksi	Penata TK I/III.d	S1 Teknik	PIM IV
9	BUDI.C.PUTRA,SE.Ak	L	Kasubag Keuangan	Penata TK I/III.d	S1 Ekonomi	PIM IV
10	MASRIVUL, SH	L	Kasi. Pencegahan	Penata TK I/III.d	S1 Hukum	PIM IV
11	YUHARLIS	P	Kasi Kesiapsiagaan	Penata /III.c	S1 Hukum	PIM IV
12	NENENG YUNINGSIH	P	Kasubag Umum & Kepegawaian	Penata Muda Tk.I/III.b	SLTA	PIM IV
13	TASMALIANDI	L	Kasi Kedaruratan	Penata Tk I /III.b	SLTA	
14	AHMAD YANI, SH.MM	L	Staf Kasi Pencegahan	IV b/ Pembina Tk I	S2 Manajemen	PIM IV PIM III
15	ARIF NUR, SH	L	Staf Kasi Kesiapsiagaan	Penata TK I/III.d	S1 Hukum	PIM IV PIM III
16	HENDRAWANSYAH, SH	L	Staf Kasi Kedaruratan	Penata TK I/III.d	S1 Hukum	PIM IV
17	YOSE PUTRA, SH	L	Staf Kasi Logistik	Penata/III.c	S1 Hukum	
18	DEWI MARNI,SE	P	Staf Kasubbag Keuangan	Penata Muda Tk.I/III.b	S1 Ekonomi	
19	RINALDI ARIFIN, SH	L	Kasi Kedaruratan	Penata Muda Tk.I/III.b	S1 Hukum	
20	NASRI SUBARJO CAN	L	Staf Kasubbag	Penata Muda Tk.I/III.b	S1 Hukum	

No	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7
			Keuangan			
21	DAVID YM, SH	L	Staf Kasubag Evalop	Penata Muda/III.a	S1 Hukum	
22	IMA MAULANA, SH	P	Staf Kasi Kesiapsiagaan	Penata Muda/III.a	SLTA	
23	ZULFIKAR.A	L	Staf Kasi Rehabilitasi	Pengatur /II.c	SLTA	
24	ALIAS	L	Staf Kaubag Keuangan	Pengatur /II.c	SLTP	
25	YULIUS SUSANTO	L	Staf Kasubbag Keuangan	Pengatur /II.c		
26	MEMLISNAR	P	Staf Kasubbag Keuangan	Pengatur /II.c	SLTA	
27	NONI RIANA	P	Staf Kasubbag Umum & Kepeg (K3)	HONOR KONTRAK	SLTA	
28	DWI SANDI UTAMI	P	Staf Kasubbag Umum & Kepeg (K3)	HONOR KONTRAK	SLTA	
29	EVI SYOVIA	P	Staf Kasubbag Umum & Kepeg (K3)	HONOR KONTRAK	SLTA	
30	YELVY ANITA RAMZAR, SH	P	Staf Kasubbag Umum & Kepeg (K3)	HONOR KONTRAK	SLTA	

No	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7
31	RESKI FAUZI	L	Staf Kasubbag Umum & Kepeg (Sopir)	HONOR KONTRAK	PAKET C	
32	NUZIL KARIM	L	Staf Kasubbag Umum & Kepeg (Sopir)	HONOR KONTRAK	SLTA	
33	ZULHAFNI	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Penata Muda/III.a	SLTA	
34	MIKO SILVANO, SPt	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Penata Muda/III.a	S1 Peternakan	
35	TAFRIZAL	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Pengatur /II.c	SMA	
36	M.RIZAL LUBIS	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Pengatur /II.c	MAN	
37	DODI ERIANTO	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Pengatur Muda.Tk.I/II.b	SMA	
38	YAUMIL AKBAR	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Pengatur /II.c	SMK	
39	FIRMAN	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Pengatur Muda.Tk.I/II.b	SMA	

No	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7
40	AMPERMAN	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Pengatur Muda/II.a	SD	
41	DIFLIZAR	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Pengatur Muda.Tk.I/II.b	SMU	
42	HERI AULIA PUTRA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Pengatur Muda/II.a	SMA	
43	EVISON	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Pengatur Muda/II.a	SMP	
44	DESRINAL.ER	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Daerah	SMA	
45	YUNI BENI ANDRI	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Daerah	SMA	
46	DELFIANTO	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Daerah	MTSN	
47	ANDRIZON NOVITRA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Daerah	SMA	
48	RACHMAD HIDAYAT	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	

No	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7
49	EDWAR YUZUF	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
50	MUSA HUTAGALUNG	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SMU	
51	NOFRIANTO	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
52	NORA FIRANDA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	MAN	
53	M. HARIS MUDA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
54	AHMAD IRFANDI	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
55	IRWANSYAH	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	MAN	
56	ROMI YARDI	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SMK	
57	YULIARDI.R	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SMK	

No	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7
58	MUHAMMAD RAHIM	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
59	ZULMALIADI	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
60	ASMIL HENDRI TANJUNG	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
61	EFRIANTO	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
62	RIO SAPUTRA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	-
63	JERRYSIO ANGGARA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
64	INDRA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
65	HUSTIA NANDA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	-
66	FAJAR APRIA PRATAMA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	

No	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7
67	M.AKBAR MULIA NASUTION	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	-
68	SAKTI MANGGARAJA LUBIS	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
69	AL FURQAN	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
70	YENDRI APRIANO	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
71	TONI TOVENDRA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
72	SYAFRIADI WIJAYA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
73	RUDI ANDRI	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
74	ROBI ISKANDAR	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
75	NANDA HANDIKA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	

No	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT
1	2	3	4	5	6	7
76	MUKMIN	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
77	HIDAYAT	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
78	ANGGIA PUTRA SIREGAR	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
79	AHMAD RIDOAN HSB	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	
80	REYMON PUTRA CHISTA	L	Staf Kasi Kedaruratan (damkar)	Honor Kontrak	SLTA	

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. Pernyataan Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dalam menghadapi era globalisasi, reformasi, tantangan dan antisipasi permasalahan serta untuk mencapai kondisi yang diharapkan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman diberi tugas dan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman.

Pernyataan tersebut merupakan wujud dan komitmen pemerintah dalam membangun masyarakat khususnya di bidang penanggulangan Bencana Daerah yang akhirnya bermuara pada keselamatan penduduk keluarga dan masyarakat serta peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat. Untuk mencapai program tersebut yang di kemas mulai dari proses yaitu perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terkoordinasi dan evaluasi menyeluruh pada setiap tahapan yang pencapaiannya harus konsisten dan berkesinabungan serta adanya perbaikan-perbaikan demi kesempurnaan.

Mempedomani dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman menetapkan visi yang merupakan gambaran yang ingin dicapai yaitu :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT PASAMAN YANG TANGGUH, TANGGAP, DAN TANGKAS DALAM MENGHADAPI BENCANA"

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi adalah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu pada hakekatnya misi merupakan tindakan nyata yang harus dilaksanakan dalam proses mewujudkan visi pembangunan.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Ketahanan Masyarakat Pasaman yang Tangguh dan Berkeadilan dalam Menghadapi Bencana"" secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelah terjadinya bencana.

Dengan telah ditetapkannya Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman maka ditindaklanjuti dengan Misi, yang jelas ini merupakan gambaran yang ingin dicapai yang dipadukan dalam program organisasi dan diharapkan seluruh PNS, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, serta masyarakat dapat memahami dan mengetahui serta mengambil manfaat dari program yang diluncurkan untuk masa yang akan datang.

Adapun misi yang dirumuskan merupakan tujuan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman kedepan adalah:

a. Melindungi masyarakat Pasaman dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
b. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.,
c. Melindungi masyarakat Pasaman dari ancaman bahaya kebakaran

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Tujuan Strategik merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan visi. Tujuan upaya penanggulangan bencana adalah " Untuk Menjamin Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Secara Terencana dan Terpadu, Terkoordinasi dan

Menyeluruh " .

Adapun tujuan strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kurun waktu lima tahun 2016-2020, meliputi:

a. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana; dan
b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal,mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
c. Meningkatkan kapasitas kewenanagan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran

Terdapat 3 (tiga) program di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang terkait secara langsung dengan penanggulangan bencana yaitu:

a. Program Peningkatan SDM Aparatur dan relawan dalam penanganan dan penanggulangan bencana.
b. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
c. Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu semua yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2011-2015) adalah:

a. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan Masy. dalam upaya bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat Kabupaten dan Kecamatan
b. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
c. Terlaksananya kapasitas kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran

d. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasii dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

2. **Kebijakan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Disusun Berdasarkan Visi Dan Misi Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pasaman. Selain Itu Juga Mempertimbangkan Kondisi Kerentanan Dan Kemampuan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Yang Diidentifikasi Dan Dianalisis Secara Partisipatif Oleh Seluruh Pemangku Kepentingan Terkait Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Pasaman

Faktor kunci keberhasilan penanggulangan bencana yang diperoleh melalui analisa SWOT, digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman

Kebijakan yang diambil dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

b. Meningkatnya kapasitas kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran

c. Terselesaikannya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir/terpadu

d. Terselesaikannya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu dan menyeluruh.

C. PRIORITAS DAERAH

Dijabarkan dalam 5 (lima) Program dan terurai dalam 13 (tiga Belas) Kegiatan sebagai berikut :

Tabel II.1 Program Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
	a. Kegiatan Administrasi perkantoran

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
	b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran c. Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
	a. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin b. Pembangunan posko pemadam kebakaran
3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
	a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
4.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
	a. Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD
5.	**Program pencegahan Dini Penanganan Bencana Alam**
	a. Kegiatan Pencegahan Dini penanganan Bencana Alam b. Kegiatan Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran c. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Relawam Bencana d. Kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran e. Operasional Penanggulangan Bencana Alam f. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstuksi

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Target dan realisasi

a. Belanja tidak langsung

- Target : nihil
- realisasi : nihil
- sisa kurang : nihil

b. belanja langsung

- Target : nihil
- realisasi : nihil
- sisa kurang : nihil

2. Permasalahan dan solusi nihil

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan realisasi

a. Belanja tidak langsung

- alokasi anggaran : 2.837.801.205,-
- realisasi anggaran : 2.665.458.798,-
- sisa lebih anggaran : 172.342.407,-

b. belanja langsung

- alokasi anggaran : 4.211.672.150,-
- realisasi anggaran : 2.441.777.000,-
- sisa lebih anggaran : 1.763.585.150,-

2.Permasalahan dan Solusi

Dana DAK tidak cair

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Program dan Kegiatan

Table 4.1
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Urusan Trantip dan Linmas				
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Kegiatan Administrasi Perkantoran	254.026.000,-	233.294.180,-	91,84
		2. Kegiatan Pemeliharaan sarana &	225.158.900,-	212.650.080,-	94,44

NO	URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Urusan Trantip dan Linmas				
		Prasarana Perkantoran			
		3. Kegiatan Rapat & Koordinasi	177.150.000,-	176.957.540,-	99,89
	2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	4. Kegiatan Pengadaan Peralatan & Mesin	1.737.676.500,-	435.576.500,-	25,07
		5. Pengadaan Pembangunan Posko Damkar	199.875.000,-	0	0
	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6. Kegiatan Pengadaan Pakaian aparatur	49.450.000,-	49.450.000,-	100
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7. Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD	10.000.000,-	9.893.000,-	98,93
	5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam	8. Pencegahan Dini Penanganan Bencana Alam	270.785.150,-	219.241.499,-	80,97
		9. Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran	201.213.100,-	159.043.500,-	79,04
		10. Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana	50.012.400,-	37.396.750,-	74,77
		11. Operasional Pemadam kebakaran	765.514.050,-	666.156.000,-	87,02
		12. Operasional Penanggulangan Bencana	147.942.750,-	133.819.200,-	90,45
		13. Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi	122.868.300,-	108.298.750,-	88,14
	TOTAL		4.211.672.150,-	2.441.777.000,-	57,98

B. Realisasi Program dan Kegiatan

Table 4.2

Realisasi Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2016 terlihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur				
	Bertambahnya Sarana dan Prasarana Aparatur				
	a. Mobil Damkar	unit	1	0	0
	b. Mobil Daeble Cabin	unit	1	1	
	c. Peralatan Rumah Tangga	set	1	1	
	d. Laptop	unit	3	3	
	e. Printer	unit	3	3	
	f. Pengadaan Pembangunan Posko Damkar	unit	1	0	0
5	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam				
	meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	bulan	100	90	90
	Jumlah anggota pemadam kebakaran yang telah selesai mengikuti pembinaan	orang	41	41	100
	Jumlah relawan bencana yang telah selesai mengikuti pembinaan kapasitas	orang	30	30	100

	Lancarnya operasinal penanggulangan bencana	bulan	12	1	100
	Lancarnya operasinal penanggulangan bencana	bulan	12	12	100
	Terlaksnananya Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi dan Penyusunan Pedoman pelaksanaan Rekonstruksi	Kec	12	12	100

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah badan penanggulangan bencana kabupaten pasaman telah berupaya seoptimal melaksanakan kewajiban dalam rangka ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Dari 13 indikator yang ditetapkan tahun 2015, hanya 2 indikator kinerja yang tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan uraian debagai berikut :

A.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Pengadaan Kendaraan Operasional Paemadam Kebakaran dianggarkan dana Rp.1.300.000.000,- realisasi O permasalahan nya dana DAK belum cair sedangkan realisasi fisik sudak 100 %

b.Pembangunan Gedung Posko Pemadam Kebakaran dianggarkan dana Rp.199.875.000,- permasalahan nya lokasi mendirikan Posko Pemadam kebakaran tidak terealisasi

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam

Untuk mendukung pencapaian indicator pada program ini di muat dalam 6 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pencegahan dini Penanganan Bencana Alam

Indikator kinerja kegiatan Pencegahan

dini Penanganan Bencana Alam yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan target sebanyak 90% dan terealisasi sebanyak 90% atau capaian

kinerja terealisasi sebesar atau 100%, Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 270.785.150,-dan terealisasi sebesar Rp219.241.499.,- atau capaian keuangan terealisasi sebesar 80,97 %.

b. .Kegiatan Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran

Indikator kinerja kegiatan Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran encana yaitu Jumlah anggota Damkar yang telah mengikuti kegiatan PPembinaan Personil Pemadam Kebakaran dengan target kinerja sebanyak 50 orang , terealisasi

sebanyak 50 orang atau capaian kinerja terealisasi sebesar atau 100%,

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 201.213.100,-- dan terealisasi sebesar Rp.159.043.500,- atau capaian keuangan terealisasi sebesar 79,04 %

c. Kegiatan Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana

Indikator kinerja kegiatan Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana yaitu Jumlah relawan bencana yang telah selesai mengikuti pembinaan kapasitas dengan target kinerja sebanyak 15 orang, dan terealisasi 15 orang atau capaian kinerja terealisasi sebesar 100%,

Anggaran yang

disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 50.012.400,-dan terealisasi sebesar Rp.37.396.750,- atau capaian keuangan terealisasi sebesar 74.77%

d. Kegiatan Operasional Pemadam kebakaran

Indikator kinerja kegiatan Operasional Pemadam kebakaran yaitu lancarnya Operasional Pemadam kebakaran dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja terealisasi 100%,

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp.

765.514.050,- dan terealisasi sebesar Rp.666.254.400,- atau capaian keuangan terealisasi sebesar 87,02 %

e. Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana yaitu lancarnya Operasional Penanggulangan Bencana dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi 12 bulan atau capaian kinerja terealisasi sebesar 100%,

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 147.942.750,-,-dan

terealisasi sebesar Rp. 136.344.200,- atau capaian keuangan terealisasi sebesar 92.16 %.

f. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi

Indikator kinerja kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi yaitu Terlaksnananya Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi pasca bencana dengan target kinerja 12 Kecamatan dan capaian kinerja terealisasi 12 kecamatan atau 100%,

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 122.868.300,-dan terealisasi sebesar

Rp108.298.750,- atau capaian keuangan terealisasi sebesar 88.14 %

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja urusan wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman tersebut dari 13 indikator adalah sebagai berikut :

Table 4.3

Capaian indikator kinerja urusan wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016

No	Klarifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator	% Pencapaian
1	100% s.d > 100%	Sangat Baik	-	-
2	90% s.d < 100%	Baik	-	-
3	80% s.d < 90%	Cukup Baik	11	84.62
4	60% s.d <80%	Sedang	-	-
5	0% s.d <60%	Gagal	2	15.38
	JUMLAH		**13**	**100 %**

Dengan demikian pencapaian urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri tersebut dengan predikat baik adalah sebanyak 11 indikator kinerja atau 84.62 **%,** dan predikat gagal sebanyak 2 indikator.dari capaian tersebut diatas dapat dilihar bahwa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman secara umum sudah baik

Untuk mengetahui perkembangan kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman, maka diperlukan analisi dengan

membandingkan capaian kinerja selama dua tahun yang dapt dilihat pada table dibawah ini :

Table 4.4

Perbandingan capaian indicator kinerja urusan wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2015 dan 2016

No	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2015 (%)**	**2016 (%)**
1	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	100	100
2	Bertambahnya sarana dan Prasarana aparatur	Unit	100	100
3	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Aparatur	Stel	100	100
4	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Paket	100	100
5	meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Orang	100	100
6	Bertambahnya sarana kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Unit	6	-
7	Pembangunan Posko Damkar	Unit	-	-
8	Lancarnya operasional penanggulangan bencana	Bulan	100	100
9	Lancarnya Operasional Pemadam kebakaran	Bulan	100	100
10	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi dan Penyusunan Pedoman pelaksanaan Rekonstruksi	Kecamatan	100	100
11	Pencegahan dini Penanganan Bencana Alam	Kecamatan	100	100
12	Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran	orang	100	100
13	Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana		100	100

C.Permasalahan dan Solusi

Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi dan Langkah-langkah antisipatif yang diambil :

No	Uraian	Permasalahan	Solusi
1	pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 pada BPBD Kabupaten Pasaman	-	-
2	Pelaksanaan urusan	**a. SDM**	

	Pemerintahan di bidang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	• masih kurangnya SDM yang terampil dan memahami aturan-aturan bidang penanggulangan bencana	mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan rapat-rapat koordinasi dengan instansi teknis yang lebih tinggi seperti Propinsi dan Pemerintahan Pusat
		• Masih banyak personil-yang belum mengikuti pelatihan secara teknis, sehingga dalam penanganan bencana kurang maksimal	Perlunya pelatihan teknis di bidang penanggulangan bencana terhadap personil yang belum dilatih
		b. Pada umumnya eselon IV belum mengikuti Diklat Pim IV	Perlunya Pejabat Eselon IV mengikuti Diklat Pimp
		PERALATAN	
		Masih kurangnya peralatan dan logistik	Mengusulkan penambahan peralatan dan logistik melalui APBD, APBD Propinsi, dan APBN
		c. Belum tersedianya protap	Menyusun Protap
		d. Dana DAK tidak tersedia	Ketersediana dana DAK
		PEMBIAYAAN	
		Kurang tersedianya dana untuk kegiatan pra bencana	Mengusulkan penambahan kegiatan pra bencana melalui APBD, APBD Propinsi, dan APBN
		Tidak tersedianya dana siap pakai (DSP) pada BPBD	Mengusulkan dana siap pakai tersedia pada BPBD

BAB V

PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. Tugas Pembantuan yang diterima

1. Penetapan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang dan Longsor di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Rao, Kecamatan rao Selatan, Kecamatan Mapat Tunggul dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Tahun 2016**.**

a. Dasar Hukum

Naskah Kesepakatan No: MUO 120/BNPB/5/2016 dan Nomor 116A/BPBD-PAS/5/2016, tanggal 9 Mai 2016, antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.103.410.500,- (enam milyar seratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

b. Kegiatan Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 berupa Biaya Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pasaman propinsi Sumatera Barat Rp.6.103.410.500,- (enam milyar seratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

a. Perbaikan Darurat Pengaman Tebing Alur Lundar di Mudiak Aia Kec Panti Rp.259.339.000,-
b. Perbaikan Darurat Normalisasi dan Pengaman Tebing Alur Sungai Lolo Kec Mapat Tunggul Selatan Rp.1.586.000.000,-
c. Perbaikan Darurat Jembatan Mudiak Lunsar I Kec Panti Rp.195.480.000,-
d. Perbaikan Darurat Jembatan Mudiak Lundsar II Kec Panti Rp.246.620.000,-
e. Perbaikan Darurat Jembatan Gantung Muaro Sei Lolo Kec Mapat Tunggul Selatan Rp.525.000.000,-
f. Perbaiakn Darurat Pembuangan Longsor Badan Jalan Partomuan, Sopan Kec Mapat Tunggul Selatan Rp.1.875.000.000,-
g. Perbaiakan Darurat Sarana Air bersih (3 lokasi) Kec Panti, Mapat Tunggul Selatan dan Muaro Sei Lolo Rp.285.971.500,-
h. Perbaiakan Darurat Dua (2) unit rumah Ibada Kec Panti Rp.100.000.000,-

i. Perbaikan Darurat satu (1) unit rumah ibadah Musalla Kec Panti Rp.50.000.000,-

j. Bantuan Stimulant kerusakan rumah Kec Panti Rp.980.000.000,0

c. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

d. SKPD yang melaksanakan: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran untuk penanganan darurat akibat banjir bandang adalah Dana Bantuan Siap Pakai untuk Penanganan darurat akibat bencana banjir bandang di wilayah Kabupaten pasaman, Propinsi Sumatera barat dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Jumlah anggaran sebesar Rp. Rp.6.103.410.500,- (enam milyar seratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

f. Permasalahan dan Solusi kegiatan

Permasalahan sampai akhir Tahun 2016 tidak ada ditemui oleh BPBD dan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan di awal Tahun 2016.

2. Desa Tangguh Bencana Tahun 2016

a. Dasar Hukum

Naskah Kesepakatan No: MUO 120/BNPB/5/2016 dan Nomor 116A/BPBD-PAS/5/2016, tanggal 9 Mai 2016, antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.582.600.000,- (lima ratus juta delapan puluh dua juta rupiah)

b. Kegiatan yang dilaksanakan
   1. Penyususnan Dokumen Penanggulangn Bencanadi Kenagaraia
      - Kenagarian Koto Kaciak Kec Bonjol
      - Kenagaraian Panti Kec Panti
   2. Rapat-rapat Pokja/ Kelompok kerja Nagari Panti dan Koto Kaciak
   3. Pembentukan anggota Pokja sebanyak 30 Orang yang terdiri dari unsure
      - Ketua Sekretaris Nagari
      - Sekrataris dari unsure Jorong, Nonil Mamak, Pemuda, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang.

c. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

g. SKPD yang melaksanakan: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman.

h. Sumber dan Jumlah Anggaran

   Sumber anggaran untuk Desa Tanggah Bencana dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).Jumlah anggaran sebesar Rp.582.600.000,- (lima ratus juta delapan puluh dua juta rupiah)

i. Permasalahan dan Solusi kegiatanpenanganan darurat akibat bencana banjir Bandang di wilayah Kabupaten Pasaman, propinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pembantuan yang diterima tidak ada

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Selama Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada memberikan tugas pembantuan pada SKPD lain.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM DAN PEMERINTAHAN

a. Kerjasama Antar Daerah Nihil

b. Kerjasama SKPD dengan Pihak Ketiga

Selama Tahun 2016 kerja sama daerah dengan pihak ketiga dibidang penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah adalah sbb:

a. Pengadaan Kendaraan Operasional Dauble Cabin

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	PT ANDALAS BERLIAN MOTOR
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	01.BAP/BPBD-PAS/2016
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Kedaruratan dan Logistik
Nama Kegiatan kerjasama	:	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional Dauble Cabin
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak III	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD	:	5 orang: - Drs. M. Sayuti Pohan, Ap S1 IV/b - JENDRI YANI, SH S1 III/D - BUDI C PUTRA, SE Ak S1 III/D - DAVID YM, SH S1 III/A - ZULFIKAR.A SLTA II/c
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana pada BPBD tahun 2016, sebesar Rp.389.676.000 ,-
Jangka Waktu Kerjasama	:	
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama	:	Nihil
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

b. Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Damkar

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	PT IMANUEL AGAPE JAKARTA
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	02.BAP/BPBD-PAS/2016
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Kedaruratan dan Logistik
Nama Kegiatan kerjasama	:	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Mobil Damkar
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD	:	6 orang - Drs. M. Sayuti Pohan, Ap S1 IV/b - JENDRI YANI, SH S1 III/D - IN ISRAIL.S.Sos S1 IV/A - BUDI C PUTRA, SE Ak S1 III/D - DAVID YM, SH S1 III/A - ZULFIKAR.A SLTA II/c
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana pada BPBD tahun 2016, sebesar DAK Rp.838.636.364 DAU Rp.425.863.636
Jangka Waktu Kerjasama	:	3 Bulan
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama	:	- Dana DAK tidak cair
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

c. Pengamanana Alur Tebing

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	CV SARI PERSADA
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	01/SP/BNPB.BAP/BPBD-PAS/2016 17 Juni 2017
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama Kegiatan kerjasama	:	Pengaman Tebing dengan Bronjong Alur Lundar Kec Panti
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi	:	3.orang

Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD		- Ir.RIZALWIN,MSi S2 IV/a - ALIAS SLTA II/C - RENI AULIA S1 III/B
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana DSP BNPB Rp.259.339.000,-
Jangka Waktu Kerjasama	:	90 Hari
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya pengamanan tebing dengan bronjong
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama	:	Nihil
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

d. engamanana Alur Tebing

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	CV YAKIN UTAMA
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	02/SP/BNPB.BAP/BPBD-PAS/2016 17 Juni 2017
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama Kegiatan kerjasama	:	Pengaman Tebing dengan Bronjong Muaro Sei Lolo Kec MT Selatan
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan	:	3.orang - Ir.RIZALWIN,MSi S2 IV/a

SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD		- ALIAS SLTA II/C - RENI AULIA S1 III/B
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana DSP BNPB Rp.1.586.000.000,-,-
Jangka Waktu Kerjasama	:	90 Hari
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya pengamanan tebing dengan bronjong
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama	:	Nihil
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

e. Perbaikan Jembatan Gantung Muaro Sei Lolo

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	CV BINTTANG SEMBIILAN
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	08/SP/BNPB.BAP/BPBD-PAS/2016 18 Juni 2017
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama Kegiatan kerjasama	:	Perbaikan Jembatan Gantung Muaro Sei lolo
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada	:	3.orang - Ir.RIZALWIN,MSi S2 IV/a - ALIAS SLTA II/C - RENI AULIA S1 III/B

SKPD		
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana DSP BNPB Rp.525.000.000,-,-
Jangka Waktu Kerjasama	:	90 Hari
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya perbaiakn jembatan
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama	:	Nihil
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

f. Pembersihan Longsoran Jalan

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	CV SWARA MANDIRI
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	03/SP/BNPB.BAP/BPBD-PAS/2016 18 Mai 2016
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama Kegiatan kerjasama	:	Pembuangan longsoran ruas jalan Pagian Tombang Kec MT Selatan
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD	:	3.orang - Ir.RIZALWIN,MSi S2 IV/a - ALIAS SLTA II/C - RENI AULIA S1 III/B

Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana DSP BNPB Rp.1.875.000.000,-,-
Jangka Waktu Kerjasama	:	90 Hari
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama	:	Nihil
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

g. Pembersihan Darurat Jembatan Mudiak Lundar I

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	CV SWARA MANDIRI
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	07/SP/BNPB.BAP/BPBD-PAS/2016 17 Mai 2016
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama Kegiatan kerjasama	:	Perbaiakn darurat Jembatan Mudiak lundar I
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD	:	3.orang - Ir.RIZALWIN,MSi S2 IV/a - ALIAS SLTA II/C - RENI AULIA S1 III/B
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana DSP BNPB Rp.195.480.000,-,-

Jangka Waktu Kerjasama	:	90 Hari
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama	:	Nihil
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

h. Pembersihan darurat Jembatan Mudiak Lundar II

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	CV HERMON
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	06/SP/BNPB.BAP/BPBD-PAS/2016 17 Juni 2016
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama Kegiatan kerjasama	:	Perbaiakan darurat Jembatan Mudiak lundar II
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD	:	3.orang - Ir.RIZALWIN,MSi S2 IV/a - ALIAS SLTA II/C - RENI AULIA S1 III/B
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana DSP BNPB Rp.246.620000,-,-
Jangka Waktu Kerjasama	:	90 Hari

Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama	:	Nihil
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

i. Perbaiakan Sarana Air Bersih

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	CV LN SEJATI
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	09/SP/BNPB.BAP/BPBD-PAS/2016 21 jUNI 2016
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama Kegiatan kerjasama	:	Perbaikan sarana air bersih di Lundar Kec Panti
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD	:	3.orang - Ir.RIZALWIN,MSi S2 IV/a - ALIAS SLTA II/C - RENI AULIA S1 III/B
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana DSP BNPB Rp.121.007.500,-,-
Jangka Waktu Kerjasama	:	90 Hari
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya
Permasalahan dan Solusi yang	:	Nihil

dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama		
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

j. Perbaikan Sarana Air Bersih

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	CV GUSTI KARYA
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	09/SP/BNPB.BAP/BPBD-PAS/2016 18 Juni 2016
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama Kegiatan kerjasama	:	Perbaikan sarana air bersih Muaro Sei lolo Kec MT Selatan
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD	:	3.orang - Ir.RIZALWIN,MSi S2 IV/a - ALIAS SLTA II/C - RENI AULIA S1 III/B
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana DSP BNPB Rp.94.484.000,-
Jangka Waktu Kerjasama	:	90 Hari
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya
Permasalahan dan Solusi yang	:	Nihil

dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama		
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

k. Perbaikan sarana air bersih

Mitra Yang Diajak Kerjasama	:	CV AKBAR
Dasar Hukum (Nomor Surat perjanjian kerjasama)	:	09/SP/BNPB.BAP/BPBD-PAS/2016 18 Juni 2016
Bidang yang dikerjasamakan	:	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Nama Kegiatan kerjasama	:	Perbaiakn saran air bersih di Pagian Kec MT Selatan
Bidang/Bagian Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan SKPD yang melaksanakan kerjasama/khususnya Bidang pada SKPD	:	3.orang - Ir.RIZALWIN,MSi S2 IV/a - ALIAS SLTA II/C - RENI AULIA S1 III/B
Sumber dan Jumlah Anggaran kerjasama	:	Dana DSP BNPB Rp.70.480.000,-
Jangka Waktu Kerjasama	:	90 Hari
Hasil (Output) Dari Kerjasama	:	Telah dilaksanakannya
Permasalahan dan Solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan	:	Nihil

kerjasama		
Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan	:	-

c. Koordinasi dengan Instansi Vertikal

1. **Kebijakan dan kegiatan**

Selama Tahun 2016 kerja sama daerah dengan pihak ketiga dibidang penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah adalah sbb:

a. Pencarian orang hilang tanggal 8 s/d 11 Desember di Kenagarian Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan TNI, POLRI, BASARNAS

b. Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 7 s/d 8 Februari 2016 di Jorong Lambak Kenagarian Panti Timur Kecamatan Panti Pemerintah Kabupaten Pasaman bekerjasama dengan TNI , POLRI, BASARNAS,BANK BRI dan PLN

2.Realisasi pelaksanaan kegiatan

a.Instansi yang terlibat

- Kodim 0305 Pasaman
- Polres Pasaman
- Basarnas
- PLN

b.Sumber dan jumlah dana

Dalam rangka penanggulangan bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Pasaman selama tahun 2016, berasal dari APBD Kabupaten Pasaman, APBD Propinsi, dan Anggaran Pusat (BNPB) dan sumbangan masyarakat.pihak ketiga lainnya, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan sumber dan jumlah anggaran sebagai berikut:

1.DPA BPBD Kabupaten Pasaman

- Anggaran yang berada DPA pada BPBD Kabupaten pasaman Tahun 2016 yang digunakan untuk Pencegahan dan penanggulangan bencana yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam ,

dengan 6 kegiatan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber
1.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam	Pencegahan dini Penanganan Bencana Alam	270.785.150,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran	201.213.100,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana	50.012.400,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Operasional Pemadam kebakaran	765.514.050,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Operasional Penanggulangan Bencana	147.942.750,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	122.868.300,-	APBD Kabupaten Pasaman

2.Belanja Tak Terduga dari DPPKA Kabupaten Pasaman

- Masyarakat yang terkena bencana alam (longsor dan banjir) dapat diberikan bantuan yang anggarannya berasal dari Belanja Tak Terduga pada Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman Tahun 2016

3.Bantuan hibah dan Bantuan Sosial dari DPPKA Kabupaten Pasaman

- Masyarakat terkena bencana kebakaran dan bencana lainnya semenjak Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016 tidak dapat diberikan Bantuan dana yang berasal dari hibah dan bantuan social terhadap masyarakat yang terkena bencana alam dan Musibah Kebakaran belum dapat direalisasikan karena berdasarkan surat Bupati Pasaman No ……. tanggal ……..perihal hasil evaluasi APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 bahwa Penyediaan anggaran hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dan barang kepada Badan/Lembaga/Kelompok/Anggota Masyarakat yang dianggarkan pada PPKD dan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk sementara waktu tidak direalisasikan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah).

4.APBD Propinsi

Untuk penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasaman selama Tahun 2016 BPBD Propinsi tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tetapi BPBD Propinsi menyalurkan bantuan dalam bentuk bantuan logistik pada saat banjir Bandang Di Jorong Lambak Kenagarain Panti Timur Kec Panti setelah adanya permintaan dari BPBD kabupaten Pasaman terlebih dahulu.

5.Anggaran Pusat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

Jumlah anggaran yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Pasaman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana penanganan darurat akibat bencana banjir Biaya Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pasaman propinsi Sumatera Barat Rp.6.103.410.500,- (enam milyar seratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

6.Dana sumbangan masyarakat dan pihak ketiga

Selama Tahun 2016 ada dana sumbangan dari masyarakat dan pihak ketiga yang langsung diterima oleh masyarakat untuk Penanggulangan Bencana Rp.156.730.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Kurang tersediannya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
- Sumber daya manusia yang kurang memadai
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangn Bencana
- Tidak tersedian nya dana DSP pada BPBD Kab.Pasaman

b.Solusi

- Meningkatkan sarana dan prasaran Penanggulangan Bencana
- Mengadakan Pelatihan Penanggulangn Bencana
- Mengadakan sosialisasi Penanggulangn Bencana
- Mengusulkan dana siap pakai tersedia pada BPBD

d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya

Table 5.1

Jumlah kejadian bencana 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Pasaman

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana Selama Setiap tahun				
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1	Banjir	4 kali	13 kali	12 kali	14 kali	20 kali

2	Tanah Longsor	4 kali	4 kali	3 kali	5 kali	4 kali
3	Gempa Bumi	4 kali	8 kali	4 kali	4 kali	-
4	Angin Badai	-	-	-	15 kali	4 kali
5	Kebakaran	13 kali	34 kali	37 kali	18 kali	14 kali
6	Ditimpa pohon	-	2 kali	5 kali	3 kali	4 kali
7	Orang Hilang	-	-	2 kali	3 kali	2 kali
8	Kebakaran lahan					2 kali
9	Orang hanyut					2 kali
	Jumlah	25 kali	61 kali	63 kali	62 kali	52 kali

Table 5.2
Daftar Jumlah Kerusakan dan Taksiran Kerugian Akibat Bencana
Tahun 2016 Di Kabupaten Pasaman

No	**Sarana dan Prasarana**	**Jumlah**		**Akibat Bencana**
		Kerusakan	**Kerugian**	
1	Rumah penduduk	500.000.000	400.000.000	Banjir, Longsor, Putting Beliung, Kebakaran,
2	Fasilitas Umum	150.000.000	100.000.000	Banjir, Longsor, Putting Beliung, Kebakaran,
3	Jalan, jembatan	1.345.000.000	500.000.000	Banjir, Longsor, Putting Beliung
4	Saluran Irigasi	400.000.000	350.000.000	Banjir, Longsor
5	DAS	900.000.000	800.000.000	Banjir, Longsor, Putting Beliung
6	Sawah dan Lahan	500.000.000	450.000.000	Banjir, Longsor
7	Rumah, Pasar, Fasum, dll	800.000.000	500.000.000	Banjir, Longsor, Kebakaran, Putting Beliung
	Jumlah	4.595.000.000	3.100.000.000,-	

Beberapa jenis bencana tersebut ditanggulangi dengan melakukan:

1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut di atas dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap Darurat, meliputi

a. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi: pengerahan sumber daya manusia; pengerahan peralatan; pengerahan logistik; imigrasi, cukai, dan karantina; perizinan; pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

b. kerusakan, dan sumber daya;

c. penentuan status keadaan darurat bencana;

Berdasarkan hasil pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi , maka Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

d. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban; pertolongan darurat; dan/atau evakuasi korban.

e. Pemenuhan kebutuhan dasar;

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan: kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial; dan penampungan dan tempat hunian. ,

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

f. perlindungan terhadap kelompok rentan;

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan

kesehatan, dan psikososial.

Kelompok rentan terdiri atas:a. bayi, balita, dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan orang lanjut usia.

g. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

2. Status Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Pasaman selama Tahun 2016 cukup tinggi dan juga mengalami kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Bencana tersebut ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bencana yang terjadi selama Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman semuanya berstatus lokal (bencana Kabupaten).

Akan tetapi walaupun bencana yang terjadi selama di Kabupaten Pasaman masih berstatus lokal, namun kerusakan dan kerugian yang dialami sungguh sangat besar sehingga penanggulangannya pada tahap Pencegahan, tanggap Darurat, pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana yang rusak serta rumah penduduk yang roboh ada yang bisa dilakukan tuntas dan ada yang tidak tuntas, karena di samping dana perbaikannya besar dan keuangan daerah tidak memungkinkan untuk mengatasinya, juga jumlah kerusakan yang belum tertangani selalu bertambah setiap tahun.

3. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka penanggulangan bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Pasaman selama tahun 2016, berasal dari APBD Kabupaten Pasaman, APBD Propinsi, dan Anggaran Pusat (BNPB) dan sumbangan masyarakat.pihak ketiga lainnya, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan sumber dan jumlah anggaran sebagai berikut:

1.DPA BPBD Kabupaten Pasaman

- Anggaran yang berada DPA pada BPBD Kabupaten pasaman Tahun 2016 yang digunakan untuk Pencegahan dan penanggulangan bencana yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam , dengan 6 kegiatan dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sumber

1.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam	Pencegahan dini Penanganan Bencana Alam	270.785.150,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran	201.213.100,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana	50.012.400,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Operasional Pemadam kebakaran	765.514.050,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Operasional Penanggulangan Bencana	147.942.750,-	APBD Kabupaten Pasaman
		Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana	122.868.300,-	APBD Kabupaten Pasaman

2.Belanja Tak Terduga dari DPPKA Kabupaten Pasaman

- Masyarakat yang terkena bencana alam (longsor dan banjir) dapat diberikan bantuan yang anggarannya berasal dari Belanja Tak Terduga pada Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman Tahun 2016

3.Bantuan hibah dan Bantuan Sosial dari DPPKA Kabupaten Pasaman

- Masyarakat terkena bencana kebakaran dan bencana lainnya semenjak Bulan Januari s/d Bulan Desember 2016 tidak dapat diberikan Bantuan dana yang berasal dari hibah dan bantuan social terhadap masyarakat yang terkena bencana alam dan Musibah Kebakaran belum dapat direalisasikan karena berdasarkan surat Bupati Pasaman No ……. tanggal ……..perihal hasil evaluasi APBD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016 bahwa Penyediaan anggaran hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dan barang kepada Badan/Lembaga/Kelompok/Anggota Masyarakat yang dianggarkan pada PPKD dan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk sementara waktu tidak direalisasikan sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah).

4.APBD Propinsi

Untuk penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasaman selama Tahun 2016 BPBD Propinsi tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tetapi BPBD Propinsi menyalurkan bantuan dalam bentuk bantuan logistik pada saat banjir Bandang Di Jorong Lambak Kenagarain Panti Timur Kec Panti setelah adanya permintaan dari BPBD kabupaten Pasaman terlebih dahulu.

5.Anggaran Pusat (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

Jumlah anggaran yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Pasaman dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana penanganan darurat akibat bencana banjir Biaya Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pasaman propinsi Sumatera Barat Rp.6.103.410.500,- (enam milyar seratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)

b. Dana sumbangan masyarakat dan pihak ketiga

Selama Tahun 2016 ada dana sumbangan dari masyarakat dan pihak ketiga yang langsung diterima oleh masyarakat untuk Penanggulangan Bencana Rp.156.730.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

4. Antisipasi Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Antisipasi daerah dalam menghadapi bencana adalah dengan menyusun beberapa program dan kegiatan, dan untuk tahun 2016 kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melauli Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam yaitu:

1) Kegiatan Pencegahan Dini Penanganan Bencana Alam

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penulusuran alur sungai , penebangan/pemotongan pohon kayu dan batang kelapa yang mengarah/condong ke jalan negara, Propinsi dan Jalan Kabupaten, dengan tujuan untuk pencegahan dini bencana alam

2) Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan Personil Pemadam Kebakaran terhadap anggota Pemadam Kebakaran dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan anggota Pemadam Kebakaran dalam menghadapi bencana kebakaran

3) Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pembinaan Kapasitas Relawan Bencana terhadap Relawan Bencana (anggota KSB, Tagana dan PMI) dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan anggota KSB, Tagana dan PMI dalam menghadapi bencana

4) Kegiatan Operasional Pemadam kebakaran

Kegiatan operasional pemadam kebakaran disediakan untuk lancarnya operasinal tenaga pemadam dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang terkena bencana alam dan kebakaran

5) Kegiatan Operasional Penanggulangan Bencana

Kegiatan operasional penanggulangan bencana disediakan untuk lancarnya operasinal tenaga pemadam dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang terkena bencana alam dan kebakaran

6) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Meninjau dan mendata lokasi bencana alam di 12 Kec
- Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi pasca bencana 12 Kecamatan

5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Berdasarkan letak Kabupaten Pasaman secara geografis merupakan wilayah territorial yang berada dalam jalur lempengan geologis aktif (patahan semangka) dan lempeng indoustralia dan Eurasia sangat rawan dan berpotensi terjadinya bencana.

Sehubungan dengan hal itu, jenis-jenis bencana alam dan kebakaran yang sering dan berpotensi terjadi di Kabupaten Pasaman adalah

a. Gempa Bumi (Seluruh Kecamatan sesuai pemetaan)
b. Banjir (Hampir di Seluruh Kecamatan sesuai pemetaan)
c. Longsor(Hampir di Seluruh Kecamatan sesuai pemetaan)
d. Angin Putting Beliung (Hampir di Seluruh Kecamatan sesuai pemetaan)
e. Kebakaran (Hampir di Seluruh Kecamatan sesuai pemetaan)

BAB VIII

PENUTUP

Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian kerja dan alat pendorong terwujudnya 'good governance' yang memiliki perspektif luas dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang diamanatkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana salah satu instansi pemerintah daerah, Badan penanggulangn Bencana Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta da;lam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah guna mewujudkan Good Governance Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optiimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Meskipun masih ada indikator kinerja yang gagal

Untuk menanggulangi kelemahan diperlukan perbaikan untuk perencanaan dalam rencana kinerja tahun yang akan datang

1. Melaksanakan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas dan relevansi indikator sehingga nantinya bisa nmengukur keberhasilan dan kegagalan pencapain suatu tujuan sehingga nantinya bisa menyajikan mengenai informasi kinerja yang kebih tajam untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang
2. Memantapkan penyusunan rencana kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra 2011-2015 dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga pada akhirnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud .
3. Laporan keterangan pertanggungjawaban(LKPJ) ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluryh pihak terkait, berfokus pada result yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi

A. Kesimpulan

1. Pada Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 5 Program dan 13 kegiatan. Kegiatan yang tidak terealisasi 2 (dua) yaitu :
   a. Pengadaan Pembangunan Posko Damkar
   b. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

Capaian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Pasaman 57,98

B. Saran

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. Dalam pengoperasian peralatan perlu pelatihan personil
2. Mengingat seringnya terjadi bencana di Kabupaten Pasaman sebaiknya disediakan dana siap pakai (DSP) yang bisa digunakan setiap saat terjadinya bencana
3. Dana untuk kegiatan Pencegahan sebaiknya terus ditingkatkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana
4. Dana untuk kegiatan Kesiapsiagaan sebaiknya terus ditingkatkan, dalam rangka untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
5. Dana untuk kegiatan Peringatan dini sebaiknya terus ditingkatkan, dalam rangka untuk pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang
6. Dana untuk kegiatan Mitigasi sebaiknya terus ditingkatkan, dalam rangka upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
7. Bantuan peralatan TRC sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana

Lubuksikaping, Januari 2017

KEPALA PELAKSANA BPBD

Drs. M. SAYUTI POHAN, AP

NIP 19740721 199402 1 003

LAMPIRAN

DAFTAR PRESTASI YANG DIPEROLEH SELAMA TAHUN 2016

1. Tingkat Provinsi Sumatera Barat

   a…..

2. Tingkat Nasional

   a…..